

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN 2017 - 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SEMARANG
MENURUT PENGELUARAN
2017 - 2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SEMARANG
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

ISSN :

Nomor Publikasi : 33740.

Katalog BPS : 9302023.3374

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 62 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Foto Gambar Kulit:

www.freepik.com

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

Penanggungjawab : Sarwono, S.Si, M.Si

Editor : Sarwono, S.Si, M.Si

Penulis : Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari, SST

Desain Kulit : Muhammad Sulthon Faarih

Desain dan Tata Letak : Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari, SST

<https://semarangkota.bpt.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Antar Daerah, Impor Antar Daerah, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga /perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, April 2022

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG
KEPALA,



Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
B. Kegunaan Statistik PDRB.....	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	6
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	7
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	10
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	13
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
E. Perubahan Inventori	19
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021	25
A. Tinjauan Agregat PDRB Kota Semarang menurut Pengeluaran	26
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	35
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	35
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38
F. Perkembangan Perubahan Inventori	39
G. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	40

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021	41
	A. PDRB (Nominal)	42
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	43
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	44
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	44
	E. Perbandingan Regional PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	45
BAB V	PENUTUP	48
	LAMPIRAN	50
	DAFTAR PUSTAKA	62

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rp)	26
Tabel 2. PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rp)	27
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Semarang menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)	29
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 Kota Semarang menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)	31
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)	32
Tabel 7. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Per-Rumah Tangga/Tahun Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Ribuan Rp)	32
Tabel 8. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Ribuan Rp)	33
Tabel 9. Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)	34
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2017-2021	35
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021	36
Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Per Kapita Kota Semarang Tahun 2017-2021	36
Tabel 13. Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021	37
Tabel 14. Perkembangan Nilai dan Proporsi PMTB Kota Semarang Tahun 2017-2021	38
Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Semarang Tahun 2017-2021	39

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2017-2021	42
Tabel 17. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang Tahun 2017-2021.....	43
Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2017-2021	44
Tabel 19. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2017-2021	45
Tabel 20. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)	46

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Triliun Rp)	28
Grafik 2. Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017 (Persen)	30
Grafik 3. Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2021 (Persen)	30

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	52
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	53
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)	54
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)	55
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021	56
Lampiran 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)	57
Lampiran 7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)	58
Lampiran 8. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Persen)	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Total nilai PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku (adhb) tahun 2021 sebesar 205,38 triliun rupiah. Terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini merupakan efek dari perbaikan ekonomi Kota Semarang yang mulai dapat beradaptasi meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sama halnya dengan PDRB adhb, terjadi pula peningkatan pada PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menjadi 144,71 triliun rupiah pada tahun 2021. Perbedaan nilai pada PDRB adhb dengan PDRB adhk terjadi disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adhb. Dalam PDRB adh Konstan, pengaruh harga telah diiadakan.

Struktur perekonomian Kota Semarang dalam lima tahun terakhir tidak banyak berubah. Komponen terbesar masih aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memberi kontribusi pada perekonomian Kota Semarang sebesar 65,62 - 72,34 persen disusul dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Konsumsi Pemerintah atau PKP menjadi komponen berikutnya yang berkontribusi dalam penyusunan PDRB pengeluaran dilanjutkan dengan konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Nilai net ekspor Kota Semarang masih menunjukkan angka negatif yang memberikan arti defisitnya kinerja perekonomian Kota Semarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan domestik yang dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar Kota Semarang dan bahkan luar negeri (impor) selalu lebih besar daripada kemampuan Kota Semarang memenuhi kebutuhan produk keluar Kota Semarang dan luar negeri (ekspor).

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun 2017 - 2021 secara rata-rata mencapai 4,66 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,81 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 kontraksi sebesar 1,85 persen. Indeks implisit atau disebut juga sebagai indeks perkembangan mencerminkan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen. Indeks implisit PDRB Kota Semarang tahun 2021 sebesar 141,93 memberi arti bahwa perubahan harga konsumen meningkat sebesar 41,93 persen dibandingkan tahun 2010. Indeks implisit terbesar terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 176,35. Dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan harga hampir 2 kali lipat pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 76,35 persen dibandingkan tahun 2010.

PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG 2021

LPE 5,16

ADHB 205.385.442,81

ADHK 144.710.662,93

Rumah Tangga



LPE 2,66

ADHB 83.857.685,98

ADHK 55.713.034,79



Lembaga Non
Profit yang
Melayani
Rumah
Tangga

4,85

1.552.823,44

914.209,26

LPE

ADHB

ADHK

Pemerintah

LPE 2,20

ADHB 24.506.595,08

ADHK 13.896.630,28



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

LPE 5,91

ADHB 134.774.641,82

ADHK 87.457.759,42



Perubahan
Inventori

ADHB 883.624,98

ADHK 812.982,20

-40,189.928,49 ADHB

-14.083.953,02 ADHK

Net

Ekspor



BAB I

PENDAHULUAN

<https://semarangkota.bps.go.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15.

Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/*daerah/region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor - impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/*daerah/region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/*daerah/region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DATA

<https://semarangkota.bps.go.id>

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*) adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS) dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh (atas dasar harga) Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya

hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *updating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya

seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PKP adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai dan penyusutan. Untuk level Provinsi, PKP Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri dengan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut, pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut dan pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal) dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan.

Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*) dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.

- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Metode langsung dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini, penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Metode Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan metode menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (*adh*) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh* berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh* Konstan, maka PMTB *adh* Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Metode Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan metode tidak langsung disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-"*deflate*" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas) yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari

Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*) serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung

adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori adh Konstan dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk

periode waktu yang berurutan;

- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
- Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021

<https://semarangkota.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kota Semarang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 sampai dengan 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat pengaruh perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Semarang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2018 dan di tengah terpuruknya nilai rupiah, perekonomian Kota Semarang masih mampu tumbuh di atas lima persen. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, pertumbuhan perekonomian Kota Semarang selalu melebihi Provinsi Jawa Tengah, bahkan Nasional. Namun pada tahun 2020, karena pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami kontraksi. Tahun 2021, Kota Semarang berhasil membalikkan arah pertumbuhan sehingga kembali tumbuh positif.

Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	69.968.827,06	76.093.195,45	82.635.066,59	79.647.650,13	83.857.685,98
2. Konsumsi LNPRT	1.117.470,89	1.254.510,64	1.451.051,92	1.437.726,95	1.552.823,44
3. Konsumsi Pemerintah	21.913.263,19	23.098.390,42	24.408.317,99	23.103.383,48	24.506.595,08
4. PMTB	115.948.771,79	124.034.864,20	134.265.590,40	124.161.147,24	134.774.641,82
5. Perubahan Inventori	800.114,07	1.277.201,37	1.200.245,61	942.294,74	883.624,98
6. Ekspor Neto	-49.456.414,97	-50.534.960,82	-52.608.236,22	-40.535.013,21	-40.189.928,49
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	160.292.032,03	175.223.201,26	191.352.036,29	188.757.189,33	205.385.442,81

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 menyatakan bahwa pada periode tahun 2017–2019, nilai PDRB Kota Semarang adhb meningkat cukup signifikan yaitu berturut-turut sebesar 160,29; 175,22 dan 191,36 dalam satuan triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan pada tahun 2020, Nilai PDRB Kota Semarang adhb mengalami penurunan menjadi 188,75 triliun rupiah. Pada tahun 2021, Nilai PDRB Kota Semarang berhasil kembali meningkat menjadi 205,38 triliun rupiah.

Tabel 2. PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	51.059.821,81	54.188.402,68	56.979.841,23	54.271.354,57	55.713.034,79
2. Konsumsi LNPRT	734.925,42	796.112,91	896.563,97	871.924,03	914.209,26
3. Konsumsi Pemerintah	13.160.552,80	13.637.316,79	14.298.744,36	13.597.027,50	13.896.630,28
4. PMTB	82.252.090,47	86.262.472,38	90.264.290,69	82.578.486,07	87.457.759,42
5. Perubahan Inventori	301.878,79	249.478,45	568.794,90	1.100.876,35	812.982,20
6. Ekspor Neto	-24.229.377,38	-23.867.420,64	22.808.717,79	-14.809.956,34	-14.083.953,02
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	123.279.891,91	131.266.362,57	140.199.517,36	137.609.712,18	144.710.662,93

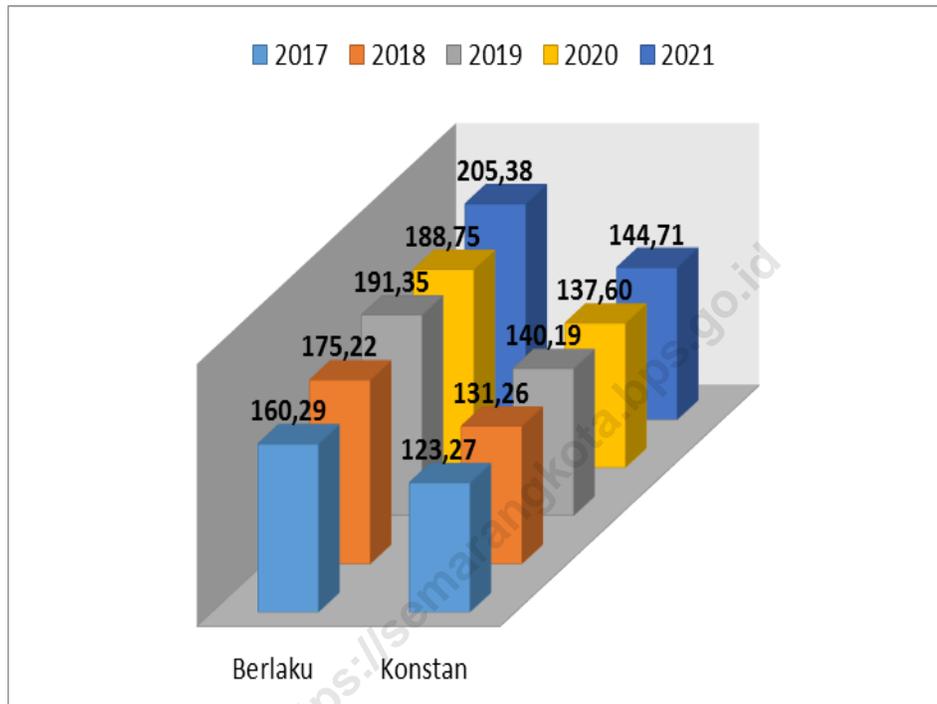
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Semarang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 – 2019, mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021.

Grafik 1 menunjukkan bahwa nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Triliun Rp)



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor neto (Net E) atau ekspor impor.

Tabel 3 berikut ini menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021, pengeluaran untuk aktivitas PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen dominan penyusun PDRB menurut pengeluaran di Kota Semarang. Lebih dari separuh nilai PDRB Kota Semarang digunakan untuk memenuhi kebutuhan PMTB. Tabel 3 memperlihatkan bahwa kontribusi PMTB berada pada rentang 65,62 sampai 72,34 persen. Kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) konsisten berada di peringkat berikutnya, yakni berkisar pada 40,83 sampai 43,65 persen.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Semarang
menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	43,65	43,43	43,18	42,20	40,83
2. Konsumsi LNPRT	0,70	0,72	0,76	0,76	0,76
3. Konsumsi Pemerintah	13,67	13,18	12,76	12,24	11,93
4. PMTB	72,34	70,79	70,17	65,78	65,62
5. Perubahan Inventori	0,50	0,73	0,63	0,50	0,43
6. Ekspor Neto	-30,85	-28,84	-27,49	-21,47	-19,57
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

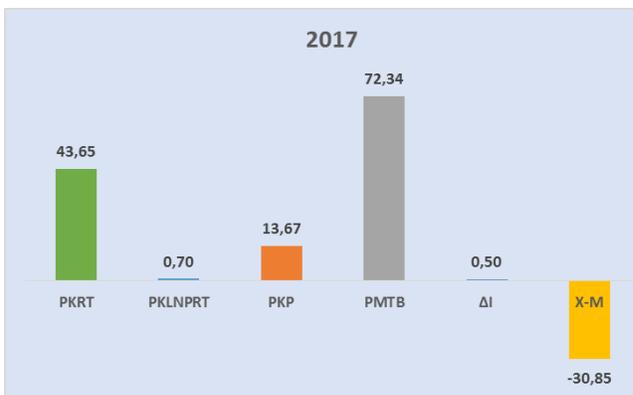
** Angka Sangat Sementara

Kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 11,93 – 13,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, kurang dari 15 persen. Pada tahun 2017-2021 perdagangan Kota Semarang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Semarang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Komponen ekspor neto berada pada rentang -30,85 hingga -19,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan domestik yang dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar Kota Semarang dan bahkan luar negeri (impor) selalu lebih besar daripada kemampuan Kota Semarang memenuhi kebutuhan produk keluar Kota Semarang dan luar negeri (ekspor).

Grafik 2 dan grafik 3 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Semarang dalam lima tahun terakhir tidak banyak berubah. Komponen terbesar masih aktivitas PMTB disusul dengan PKRT. Konsumsi Pemerintah atau PKP menjadi komponen berikutnya yang berkontribusi dalam penyusunan PDRB pengeluaran dilanjutkan dengan konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Nilai ekspor neto Kota Semarang masih menunjukkan angka negatif yang memberikan arti defisitnya kinerja perekonomian Kota Semarang.

Grafik 2. Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2016 (Persen)



Grafik 3. Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2020 (Persen)



ΔI : Perubahan Inventori

X-M : Ekspor Neto

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan riil PDRB menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Tabel 4 berikut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun 2017–2021 secara rata-rata mencapai 4,66 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,70 persen (2017); 6,48 persen (2018); 6,81 persen (2019); -1,85 persen (2020); dan 5,16 persen (2021). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,81 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,85 persen).

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 Kota Semarang menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,07	6,13	5,15	-4,75	2,66
2. Konsumsi LNPR	5,36	8,33	12,62	-2,75	4,85
3. Konsumsi Pemerintah	4,70	3,62	4,85	-4,91	2,20
4. PMTB	5,33	4,88	4,64	-8,51	5,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Total PDRB	6,70	6,48	6,81	-1,85	5,16

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator turunan berikutnya dari nilai PDRB adalah indeks implisit. Indeks implisit atau disebut juga sebagai indeks perkembangan mencerminkan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Indeks implisit merupakan hasil perhitungan dari nilai PDRB adhb dibandingkan dengan nilai PDRB adhk tahun berjalan. Indeks implisit PDRB Kota Semarang tahun 2021 sebesar 141,93 memberi arti bahwa perubahan harga konsumen meningkat sebesar 41,93 persen dibandingkan tahun 2010. Indeks implisit terkecil terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 150,52. Dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan harga sekitar 1,5 kali lipat pada komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 50,52 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	137,03	140,42	145,03	146,76	150,52
2. Konsumsi LNPRT	152,05	157,58	161,85	164,89	169,85
3. Konsumsi Pemerintah	166,51	169,38	170,70	169,91	176,35
4. PMTB	140,97	143,79	148,75	150,36	154,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Total PDRB	130,02	133,49	136,49	137,17	141,93

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Perkembangan positif kondisi perekonomian akan mempengaruhi konsumsi akhir rumah tangga. Kondisi perekonomian yang menunjukkan tren positif diharapkan akan meningkatkan daya beli sehingga memicu peningkatan konsumsi masyarakat. Penawaran dan persediaan berbagai barang dan jasa di pasar domestik yang melimpah (termasuk yang berasal dari impor) turut berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi, salah satunya yaitu konsumsi rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Semarang Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rp)

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	69 968,82	76 093,19	82.635,06	79.647,65	83.857,68
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	51 059,82	54 188,40	56.979,84	54.271,35	55.713,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	43,65	43,43	43,18	42,20	40,83

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perkembangan penggunaan konsumsi akhir rumah tangga Kota Semarang dapat diketahui pada tabel 6. Dalam kurun waktu 2017-2019, konsumsi rumah tangga terus meningkat baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan). Tahun 2017, konsumsi rumah tangga adhb mencapai 69,96 triliun rupiah dan 51,05 triliun rupiah untuk adhk. Nilai komponen ini semakin meningkat mencapai 82,63 triliun rupiah secara nominal dan secara riil mencapai 56,97 triliun rupiah pada tahun 2019. Tahun 2020, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan baik secara adhb maupun adhk. Tahun 2021, komponen konsumsi rumah tangga kembali meningkat baik secara adhb maupun adhk.

Proporsi PKRT terhadap PDRB adhb Kota Semarang terus menurun sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Secara rata-rata, kontribusi PKRT terhadap PDRB adhb Kota Semarang sebesar 42,65 persen.

Tabel 7. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Per-Rumah Tangga/Tahun Kota Semarang Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rp)

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	150 780,91	161 368,93	172 537,77	182 544,12	191 755,80
b. ADHK 2010	110 032,52	114 915,98	118 970,98	124 384,29	127 397,95
Jumlah RT (unit)	464 043	471 548	478 939	436 320	437 315

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7 memperlihatkan bahwa rata-rata porsi pengeluaran konsumsi per rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada PDRB adhb maupun adhk dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 rata-rata konsumsi per rumah tangga sebesar 150,78 juta rupiah. Dapat diartikan bahwa setiap rumah tangga Kota Semarang pada tahun 2017 rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 150,78 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2019 rata-rata konsumsi per rumah tangga sebesar 172,53 juta dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi 191,75 juta per rumah tangga.

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Berlaku. Dalam nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Tabel 8. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun Kota Semarang Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rp)

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	39 807,35	42 602,65	45 747,77	48 189,67	50 621,46
b. ADHK 2010	29 049,46	30 338,71	31 544,73	32 836,11	33 631,68
Jumlah penduduk (org)	1 757 686	1 786 114	1 806 319	1 652 795	1 656 564

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, nilai rata-rata konsumsi per-kapita per tahun pun mengalami peningkatan yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 39,80 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Semarang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 39,80 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan,

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2021 rata-rata konsumsi per kapita sebesar 50,62 juta rupiah.

Peningkatan nilai rata-rata konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kota Semarang meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai. Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Berlaku. Dalam nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Tabel 9. Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total konsumsi RT	5,07	6,13	5,15	-4,75	2,66
b. Per-RT	3,36	4,44	3,53	4,55	2,42
c. Perkapita	3,36	4,44	3,98	4,09	2,42
Jumlah RT (unit)	464 043	471 548	478 939	436 320	437 315
Jumlah penduduk (org)	1 757 686	1 786 114	1 806 319	1 652 795	1 656 564

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 9 memperlihatkan bahwa apabila dilihat menurut harga konstan, secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,07 persen pada tahun 2017. Kemudian menguat pada tahun 2018 sebesar 6,13 persen kemudian melemah pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,75 persen pada tahun 2020 dan berhasil membalikkan arah pada tahun 2021 dengan tumbuh positif sebesar 2,66 persen. Pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi per rumah tangga terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,55 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi per kapita juga terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,44 persen.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 10 menyatakan bahwa pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pertumbuhan tahun 2017 yaitu sebesar 5,36 persen. Seiring mendekati pemilihan presiden pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat mencapai 8,33 persen pada tahun 2018. Kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2019 yakni sebesar 12,62 persen dan melemah menjadi -2,75 persen pada tahun 2020. Kemudian berhasil kembali menguat sebesar 4,85 persen pada tahun 2021.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2017 – 2021**

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 117,47	1 254,51	1 451,05	1 437,72	1 552,82
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	734,92	796,11	896,56	871,92	914,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,70	0,72	0,76	0,76	0,76
Pertumbuhan (% ADHK)	5,36	8,33	12,62	-2,75	4,85

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Semarang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran

konsumsi akhir pemerintah adhb sebesar 21,91 triliun rupiah, terus meningkat hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai 24,50 triliun rupiah.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	21 913,26	23 098,39	24 408,31	23 103,38	24 506,59
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	13 160,55	13 637,31	14 298,74	13 597,02	13 896,63
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	13,67	13,18	12,76	12,24	11,93

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 11 juga menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah adhk 2010 pada kurun waktu 2017 sampai 2021 sedikit berfluktuasi. Peningkatan nilai total konsumsi pemerintah menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan terjadi peningkatan total konsumsi pemerintah Kota Semarang, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020.

Menarik untuk dicermati bahwa peningkatan nilai total konsumsi pemerintah adhb yang ditunjukkan pada tabel 11 tidak diikuti dengan peningkatan proporsinya. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 proporsi nilai total konsumsi pemerintah sebesar 13,67 persen, turun menjadi 13,18 pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 proporsinya sebesar 11,93 persen.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Per Kapita Kota Semarang Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	12 467,11	12 932,20	13 512,74	13 978,37	14 793,63
b. ADHK 2010	7 487,43	7 635,19	7 915,96	8 226,69	8 388,83
Jumlah penduduk (org)	1 757 686	1 786 114	1 806 319	1 652 795	1 656 564

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita adhb sebesar 12,46 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021 konsumsi pemerintah adhb per kapita sebesar 14,79 juta rupiah. Sejalan dengan konsumsi pemerintah per kapita adhb, kondisi konsumsi pemerintah per kapita adhk juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 13 menunjukkan kondisi perkembangan pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara “riil” baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per kapita). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Tabel 13. Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan ¹⁾ (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	4,70	3,62	4,85	-4,91	2,20
b. Konsumsi perkapita	2,99	1,97	3,68	3,93	1,97
Jumlah penduduk (org)	1 757 686	1 786 114	1 806 319	1 652 795	1 656 564

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam kurun waktu 2017-2021, pertumbuhan total konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,85 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam hal penghematan anggaran. Perkembangan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita tidak mengikuti pola yang sama dengan pertumbuhan total konsumsi pemerintah, pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan pada konsumsi perkapita. Hal ini karena terjadi penurunan jumlah penduduk yang tidak sebesar penurunan total konsumsi pemerintah.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital yang dimaksud yaitu sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), pengeluaran total PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun secara *riil*. Tabel 14 berikut ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran total PMTB secara nominal tergambar melalui peningkatan nilai PDRB adhb komponen total PMTB. Pada tahun 2017 nilai total PMTB sebesar 115,94 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 134,26 triliun rupiah pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 124,16 triliun rupiah. Tahun 2021 komponen total PMTB kembali meningkat mencapai 134,77 triliun rupiah.

Tabel 14. Perkembangan Nilai dan Proporsi PMTB Kota Semarang Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	115 948,77	124 034,86	134 265,59	124 161,14	134 774,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	82 252,09	86 262,47	90 264,29	82 578,48	87 457,75
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	72,34	70,79	70,17	65,78	65,62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sejalan dengan PMTB atas dasar harga berlaku, tahun 2017 nilai total PMTB sebesar 82,25 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 90,26 triliun rupiah pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 82,57 triliun rupiah pada tahun 2020 dan kembali meningkat mencapai 87,45 triliun rupiah pada tahun 2021. Meskipun nilai total PMTB selalu meningkat setiap tahunnya, kontribusi komponen ini cenderung menurun pada periode tahun 2017-2021.

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

**Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Semarang Tahun 2017 – 2021**

U r a I a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	800,11	1 277,20	1 200,24	942,29	883,62
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	301,87	249,47	568,79	1 100,87	812,98
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,50	0,73	0,63	0,50	0,43

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB terus berfluktuasi dalam kurun waktu 2017 hingga 2021. Proporsi perubahan inventori Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2018. Setelah tahun 2018 sampai tahun 2021, perubahan inventori Kota Semarang mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2021, tercatat bahwa proporsi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,43 persen.

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar Kabupaten/Kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Dalam lima tahun terakhir, net ekspor Kota Semarang selalu bernilai negatif yang berarti nilai impor antar daerah lebih besar daripada ekspor antar daerah.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2017–2021

<https://semarangkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2017 – 2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	160 292,03	175 223,20	191 352,03	188 757,18	205 385,44
- ADHK 2010	123 279,89	131 266,36	140 199,51	137 609,71	144 710,66
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	91 194,92	98 103,03	105 934,80	114 204,84	123 982,80
- ADHK 2010	70 137,61	73 492,71	77 616, 14	83 258,79	87 355,91
Jumlah penduduk (org)	1 757 686	1 786 114	1 806 319	1 652 795	1 656 564

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

PDRB perkapita Kota Semarang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sedangkan jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2020.

Penurunan jumlah penduduk 8,50 persen lebih besar dibandingkan penurunan PDRB Kota Semarang yang berkontraksi 1,85 persen. Hal ini menyebabkan PDRB perkapita Kota Semarang tetap mengalami peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, nilai PDRB Kota Semarang, jumlah penduduk, dan PDRB perkapita tumbuh positif.

Tabel 17. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,96	4,78	5,61	7,27	4,92
Pertumbuhan penduduk	1,65	1,62	1,13	-8,50	0,23

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan perkapita secara “riil” mengalami peningkatan di kisaran 4 - 7 persen pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Berbeda halnya dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata tumbuh sekitar 1,47 persen pada tahun 2017 - 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,50 persen dan menjadi pertumbuhan terendah pada periode 2017 - 2021. Pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk kembali bernilai positif sebesar 0,23 persen.

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Dalam PDRB penggunaan Kota Semarang, konsumsi akhir rumah tangga merupakan kontributor dominan ke dua setelah PMTB. Pada tahun 2021 konsumsi akhir rumah tangga menyumbang 40,83 persen dari total perekonomian Kota Semarang. Dapat diartikan bahwa dari seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Semarang, sebesar 40,83 persen digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Semarang tersebut, sebagiannya berasal dari impor.

C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Semarang lebih besar digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto daripada untuk konsumsi akhir rumah tangga. Semakin kecil rasionya dapat diartikan bahwa PDRB Kota Semarang lebih banyak digunakan untuk investasi daripada untuk konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menjadi suatu indikasi makin membaiknya iklim investasi. Iklim investasi yang semakin baik harapannya akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	69 968,82	76 093,19	82 635,06	79 647,65	83 857,68
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	115 948,77	124 034,86	134 265,59	124 161,14	134 774,64
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0,60	0,61	0,62	0,64	0,62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 0,62. Hal ini memberi arti bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 0,62 kali lebih kecil dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung relatif stabil selama lima tahun terakhir.

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pada kurun waktu 2017-2021, lebih dari 53 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Semarang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mengalami tren menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dari 58,02 persen pada tahun 2017 turun menjadi 57,33 persen pada tahun 2018, kemudian terus menerus turun hingga tahun 2021 sebesar 53,52 persen. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan net ekspor memiliki peran yang lebih kecil daripada konsumsi akhir baik rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah, sebesar kurang dari 47 persen.

Tabel 19. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	69 968,82	76 093,19	82 635,06	79 647,65	83 857,68
b. LNPRT	1 117,47	1 254,51	1 451,05	1 437,72	1 552,82
c. Pemerintah	21 913,26	23 098,39	24 408,31	23 103,38	24 506,59
Jumlah	92 999,56	100 446,09	108 494,43	104 188,76	109 917,10
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	160 292,03	175 223,20	191 352,03	188 757,18	205 385,44
Proporsi	58,02	57,33	56,70	55,20	53,52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tren penurunan proporsi penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB secara implisit memberi arti bahwa telah terjadi peningkatan proporsi PMTB dan ekspor (selain konsumsi akhir) pada periode tahun 2017-2021.

E. PERBANDINGAN REGIONAL PDRB KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang PDRB terbesar di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Pada tahun 2019 kontribusi PDRB Kota Semarang 14,06 persen dan meningkat hingga 14,45 persen pada tahun 2021. Urutan kedua penyumbang PDRB terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, dan kemudian disusul Kabupaten Kudus, dengan rata-rata kontribusi di atas 7 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sedangkan kabupaten/kota dengan kontribusi

terendah adalah Kota Magelang dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 0,65 persen dari total PDRB Jawa Tengah. Besaran kontribusi tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 20. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Cilacap	114.117.079,76	105.150.538,55	110.262.462,98
Kabupaten Banyumas	53.948.860,05	53.682.118,37	56.919.815,96
Kabupaten Purbalingga	24.917.589,96	25.093.682,28	26.393.807,46
Kabupaten Banjarnegara	21.599.477,27	21.694.375,77	22.827.887,30
Kabupaten Kebumen	27.936.659,65	28.014.905,70	29.563.144,02
Kabupaten Purworejo	18.657.373,14	18.646.488,02	19.616.171,28
Kabupaten Wonosobo	18.807.664,10	18.838.679,07	19.856.862,36
Kabupaten Magelang	32.497.408,50	32.462.030,10	34.176.312,43
Kabupaten Boyolali	32.665.981,16	32.696.289,90	34.906.160,78
Kabupaten Klaten	39.766.522,78	39.945.640,38	42.295.255,88
Kabupaten Sukoharjo	36.945.880,36	36.890.533,42	38.990.458,19
Kabupaten Wonogiri	29.044.917,06	29.165.548,14	30.580.892,45
Kabupaten Karanganyar	37.014.752,03	37.023.453,39	39.158.453,93
Kabupaten Sragen	37.836.230,82	37.850.990,68	40.087.775,48
Kabupaten Grobogan	27.278.521,82	27.268.744,50	28.815.024,86
Kabupaten Blora	25.965.937,47	24.013.984,57	26.960.315,27
Kabupaten Rembang	18.944.046,78	18.943.648,80	20.071.106,77
Kabupaten Pati	43.039.953,68	43.288.579,86	45.570.727,47
Kabupaten Kudus	110.580.428,47	109.532.704,12	108.214.899,14
Kabupaten Jepara	30.230.196,61	30.175.170,54	32.045.698,36
Kabupaten Demak	26.184.294,58	26.546.066,41	27.646.728,98

Kabupaten Semarang	49.620.375,46	49.046.716,57	51.805.057,31
Kabupaten Temanggung	21.648.988,07	21.557.077,66	22.627.792,08
Kabupaten Kendal	42.550.706,97	42.586.191,23	45.164.800,80
Kabupaten Batang	21.585.719,48	21.621.362,81	23.125.755,99
Kabupaten Pekalongan	22.857.063,60	22.803.192,93	24.030.302,70
Kabupaten Pemasang	25.483.601,77	25.820.820,04	27.446.905,64
Kabupaten Tegal	35.217.969,61	35.300.027,84	37.335.993,58
Kabupaten Brebes	46.178.657,58	47.074.595,60	48.938.736,57
Kota Magelang	8.806.285,60	8.713.158,54	9.178.780,19
Kota Surakarta	47.999.714,41	47.621.820,53	50.371.564,19
Kota Salatiga	13.310.955,95	13.271.841,36	14.006.588,97
Kota Semarang	191.352.036,29	188.757.189,33	205.385.442,81
Kota Pekalongan	10.873.976,04	10.818.530,64	11.428.319,23
Kota Tegal	15.284.713,52	15.224.661,62	16.017.144,53
JAWA TENGAH	1.360.960.130,98	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB V
PENUTUP

<https://semarangkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017-2021 menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Semarang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis mengenai perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series dari tahun 2017 s.d 2021, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Data terkait interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan dalam publikasi ini melalui Ekspor Neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan sejauh mana ketergantungan ekonomi Kota Semarang terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the region*).

LAMPIRAN

<https://semarangkota.bps.go.id>

CATATAN :

FORMAT TABEL POKOK UNTUK PDRB PENGELUARAN KAB/KOTA :

1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah tangga

2. Pengeluaran Konsumsi
LNPR

3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

4. Pembentukan Modal
Tetap Bruto

5. Perubahan
Inventori

6. Net Ekspor

PDRB PENGELUARAN
(1+2+3+4+5+6)

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69.968.827,06	76.093.195,45	82.635.066,59	79.647.650,13	83.857.685,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.117.470,89	1.254.510,64	1.451.051,92	1.437.726,95	1.552.823,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.913.263,19	23.098.390,42	24.408.317,99	23.103.383,48	24.506.595,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	115.948.771,79	124.034.864,20	134.265.590,40	124.161.147,24	134.774.641,82
5. Perubahan Inventori	800.114,07	1.277.201,37	1.200.245,61	942.294,74	883.624,98
6. Net Ekspor	-49.456.414,97	-50.534.960,82	-52.608.236,22	-40.535.013,21	-40.189.928,49
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	160.292.032,03	175.223.201,26	191.352.036,29	188.757.189,33	205.385.442,81

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51.059.821,81	54.188.402,68	56.979.841,23	54.271.354,57	55.713.034,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	734.925,42	796.112,91	896.563,97	871.924,03	914.209,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.160.552,80	13.637.316,79	14.298.744,36	13.597.027,50	13.896.630,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	82.252.090,47	86.262.472,38	90.264.290,69	82.578.486,07	87.457.759,42
5. Perubahan Inventori	301.878,79	249.478,45	568.794,90	1.100.876,35	812.982,20
6. Net Ekspor	-24.229.377,38	-23.867.420,64	-22.808.717,79	-14.809.956,34	-14.083.953,02
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	123.279.891,91	131.266.362,57	140.199.517,36	137.609.712,18	144.710.662,93

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	43,65	43,43	43,18	42,20	40,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,70	0,72	0,76	0,76	0,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,67	13,18	12,76	12,24	11,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	72,34	70,79	70,17	65,78	65,62
5. Perubahan Inventori	0,50	0,73	0,63	0,50	0,43
6. Net Ekspor	-30,85	-28,84	-27,49	-21,47	-19,57
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,07	6,13	5,15	-4,75	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,36	8,33	12,62	-2,75	4,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,70	3,62	4,85	-4,91	2,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,33	4,88	4,64	-8,51	5,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	6,70	6,48	6,81	-1,85	5,16

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	137,03	140,42	145,03	146,76	150,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	152,05	157,58	161,85	164,89	169,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	166,51	169,38	170,70	169,91	176,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	140,97	143,79	148,75	150,36	154,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	130,02	133,49	136,49	137,17	141,93

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,32	2,47	3,28	1,20	2,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,44	3,64	2,71	1,88	3,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,10	1,72	0,78	-0,46	3,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,29	2,00	3,45	1,08	2,49
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	2,16	2,66	2,25	0,50	3,47

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Cilacap	114.117.079,76	105.150.538,55	110.262.462,98
Kabupaten Banyumas	53.948.860,05	53.682.118,37	56.919.815,96
Kabupaten Purbalingga	24.917.589,96	25.093.682,28	26.393.807,46
Kabupaten Banjarnegara	21.599.477,27	21.694.375,77	22.827.887,30
Kabupaten Kebumen	27.936.659,65	28.014.905,70	29.563.144,02
Kabupaten Purworejo	18.657.373,14	18.646.488,02	19.616.171,28
Kabupaten Wonosobo	18.807.664,10	18.838.679,07	19.856.862,36
Kabupaten Magelang	32.497.408,50	32.462.030,10	34.176.312,43
Kabupaten Boyolali	32.665.981,16	32.696.289,90	34.906.160,78
Kabupaten Klaten	39.766.522,78	39.945.640,38	42.295.255,88
Kabupaten Sukoharjo	36.945.880,36	36.890.533,42	38.990.458,19
Kabupaten Wonogiri	29.044.917,06	29.165.548,14	30.580.892,45
Kabupaten Karanganyar	37.014.752,03	37.023.453,39	39.158.453,93
Kabupaten Sragen	37.836.230,82	37.850.990,68	40.087.775,48
Kabupaten Grobogan	27.278.521,82	27.268.744,50	28.815.024,86
Kabupaten Blora	25.965.937,47	24.013.984,57	26.960.315,27
Kabupaten Rembang	18.944.046,78	18.943.648,80	20.071.106,77
Kabupaten Pati	43.039.953,68	43.288.579,86	45.570.727,47
Kabupaten Kudus	110.580.428,47	109.532.704,12	108.214.899,14
Kabupaten Jepara	30.230.196,61	30.175.170,54	32.045.698,36
Kabupaten Demak	26.184.294,58	26.546.066,41	27.646.728,98
Kabupaten Semarang	49.620.375,46	49.046.716,57	51.805.057,31
Kabupaten Temanggung	21.648.988,07	21.557.077,66	22.627.792,08
Kabupaten Kendal	42.550.706,97	42.586.191,23	45.164.800,80

Kabupaten Batang	21.585.719,48	21.621.362,81	23.125.755,99
Kabupaten Pekalongan	22.857.063,60	22.803.192,93	24.030.302,70
Kabupaten Pemalang	25.483.601,77	25.820.820,04	27.446.905,64
Kabupaten Tegal	35.217.969,61	35.300.027,84	37.335.993,58
Kabupaten Brebes	46.178.657,58	47.074.595,60	48.938.736,57
Kota Magelang	8.806.285,60	8.713.158,54	9.178.780,19
Kota Surakarta	47.999.714,41	47.621.820,53	50.371.564,19
Kota Salatiga	13.310.955,95	13.271.841,36	14.006.588,97
Kota Semarang	191.352.036,29	188.757.189,33	205.385.442,81
Kota Pekalongan	10.873.976,04	10.818.530,64	11.428.319,23
Kota Tegal	15.284.713,52	15.224.661,62	16.017.144,53
JAWA TENGAH	1.360.960.130,98	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020*	2021**
(1)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Cilacap	8,39	7,81	7,76
Kabupaten Banyumas	3,96	3,98	4,00
Kabupaten Purbalingga	1,83	1,86	1,86
Kabupaten Banjarnegara	1,59	1,61	1,61
Kabupaten Kebumen	2,05	2,08	2,08
Kabupaten Purworejo	1,37	1,38	1,38
Kabupaten Wonosobo	1,38	1,40	1,40
Kabupaten Magelang	2,39	2,41	2,40
Kabupaten Boyolali	2,40	2,43	2,46
Kabupaten Klaten	2,92	2,97	2,97
Kabupaten Sukoharjo	2,72	2,74	2,74
Kabupaten Wonogiri	2,13	2,16	2,15
Kabupaten Karanganyar	2,72	2,75	2,75
Kabupaten Sragen	2,78	2,81	2,82
Kabupaten Grobogan	2,00	2,02	2,03
Kabupaten Blora	1,91	1,78	1,90
Kabupaten Rembang	1,39	1,41	1,41
Kabupaten Pati	3,16	3,21	3,21
Kabupaten Kudus	8,13	8,13	7,61
Kabupaten Jepara	2,22	2,24	2,25
Kabupaten Demak	1,92	1,97	1,94
Kabupaten Semarang	3,65	3,64	3,64
Kabupaten Temanggung	1,59	1,60	1,59
Kabupaten Kendal	3,13	3,16	3,18

Kabupaten Batang	1,59	1,60	1,63
Kabupaten Pekalongan	1,68	1,69	1,69
Kabupaten Pemalang	1,87	1,92	1,93
Kabupaten Tegal	2,59	2,62	2,63
Kabupaten Brebes	3,39	3,49	3,44
Kota Magelang	0,65	0,65	0,65
Kota Surakarta	3,53	3,54	3,54
Kota Salatiga	0,98	0,99	0,99
Kota Semarang	14,06	14,01	14,45
Kota Pekalongan	0,80	0,80	0,80
Kota Tegal	1,12	1,13	1,13
JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund (UNPF)*, *Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2020*, Jakarta, 2015
6. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
9. _____, *Jawa Tengah dalam Angka*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
13. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
14. Hardjana, A. 1994. *Orientasi Perilaku Konsumsi tentang Masalah Pangan dan Gizi dari Sumber Hayati Kelautan*. Risalah Widyakarya Pangan dan Gizi. Jakarta: LIPI.
15. Subarna, Trisna. 2012. *Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat*. Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 4 Desember 2012 Halaman 243 – 250.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://semarangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jln. Inspeksi Kali Semarang no.1, Semarang, Jawa Tengah
Telp/ Fax 024-3546413
E-mail : bps3374@bps.go.id
Website : <http://semarangkota.bps.go.id>